



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARTO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **146901**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.185.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/75 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **194.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5 MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **13.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **22.863.231**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 2.414.863.231

III. HUTANG

Rp. 80.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.334.863.231

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.